

DAFTAR PUSTAKA

Albrecht, W. Steve, Conan C. Albrecht, Chad O. Albrecht, and Mark F. Zimbelman. 2009. *Fraud Examination*. Third Edition. South-Western Cengage Learning.

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley,. 2008. *Auditing and Assurance Service*. New Jersey: Person, Prentice Hall.

Arfah, Eka Ariaty, 2011. Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud pengadaan Barang dan Implikasinya Pada kinerja Keuangan (Studi Pada Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kota Bandung). *Jurnal Investasi* Volume 7 Nomor 2.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Anggi, Dhesyari KA. 2015. Analisis Prosedur Penyelesaian Masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta. Tugas Akhir. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2016, Pemeriksaan Laporan Keuangan*, Jakarta :Penerbitan BPK-RI.

Bennet, R. 2010. *Decentralizing Authority After Suharto: Indonesia's Big Bang, 1998-2010. Innovations for Successful Societies*.Princeton University.

Eddy, Mulyadi Soepardi, 2007, Upaya pencegahan fraud dalam Pengelolaan Keuangan negara, *EBAR, Volume II, Nomor 1, Januari-April*.

Herman, Lisa Amelia. 2013. Pengaruh keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kecurangan (Studi Empiris Pada kantor Cabang Utama Bank pemerintah di Kota Padang). Skripsi. Padang. Universitas Negeri Padang.

Hertanto, Hasril. 2009. Mengadali Whistleblower. Jaringan Advokasi Untuk Whistleblower. Artikel. Jakarta Pusat.

Indriana, Puji Lestari. 2007. Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Daerah dalam Meminimalisasi Kerugian Negara/Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Thesis. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.

Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Edisi 1. Andi. Yogyakarta.

Kawedar, Warsito. 2009. Opini Audit dan Sistem Pengendalian Intern. Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 6 Nomor 1.

Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Marbun, Zindar Kar.1996. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyelesaian Kerugian Negara: Suatu Kajian Penanganan Kerugian Negara di Departemen Pekerjaan Umum. Thesis. Yogyakarta. Universitas Indonesia

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Penerbit Andi.

Makawimbang, H. F. 2014. *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Thafa Media.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 67 Tahun 2015 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan Barang Daerah.

Rai, Agung. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Siti Kurnia Rahayu dan Eli Suhayati. 2009. *Auditing Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Bandung : Graha Ilmu.

Slamet, B. 2010. *Metode Perhitungan Kerugian Negara Dalam Audit Investigatif*. Jakarta: Pusdiklatwas BPKP.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*, CV Alfabeta. Bandung.

Sukardi. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Syahril, Rizki Alfi. 2013. *Identifikasi Kerugian Negara Pada Pemerintahan Daerah: Kasus di Indonesia*. Thesis. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.

Tuanakotta, T. 2007. Akuntansi Forensik & Audit Investigatif, Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Tuanakotta, T. 2014. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2003. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara . 2004. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.2004. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Negara.2004. Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh.

